

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/232/KPTS/06/2001**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2001–2005**

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran, serta kebijaksanaan, sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005, perlu disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005;
- b. Bahwa REPETEDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 dimaksudkan untuk mengakumulasikan rencana kegiatan pembangunan tahunan Dinas/Instansi se Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan RENSTRA Dinas/instansi se Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas/Lembaga Teknis/Instansi se Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETEDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang memuat Program dan Kegiatan Tahunan untuk periode Tahun 2001-2005 pada Dinas, Lembaga Teknis, dan Instansi se Kabupaten Lampung Barat yang dikelompokkan sesuai dengan Program Strategik, Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam POLDAS, RENSTRA, dan PROPEDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.

**KEDUA** : REPETEDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 adalah sebagai salah satu acuan dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan tahunan di Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode tahun 2001-2005.

**KETIGA** : REPETEDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 dimaksud adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
- III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- IV. TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN
- V. PROGRAM AKSI DAN INDIKATOR KINERJA
- VI. KAIDAH PELAKSANAAN
- VII. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 28 Desember 2001

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

## **I WAYAN DIRPHA**

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Sdr. Ketua Komisi A, B, C, D, dan E DPRD Kabupaten Lampung Barat.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah Kabupaten merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah propinsi. Pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian proses aktivitas manusia yang dilakukan secara terus menerus pada suatu daerah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat pada khususnya.

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya diartikan sebagai pembangunan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat esensial dan peranan pemerintah terutama haruslah sebagai fasilitator, pembina, dan pengarah dalam arti seluas-luasnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, pembangunan haruslah dapat memanfaatkan sumberdaya alam, teknologi, modal dan

sumberdaya pembangunan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan nilai tambah secara optimal. Pembangunan saerah Kabupaten Lampung Barat itu sendiri haruslah dapt memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan (POLSDAS), Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Program Daerah (PROPEDA) Kabupaten.

Oleh karena pembangunan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efesien agar hasil-hasil yang dicapai lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Untuk itu maka diperlukan adanya suatu perencanaan kegiatan yang bertahap yang dtuangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETEDA) yang merupakan pentahapan suatu proses pembangunan yang berdimensi waktu jangka pendek dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Repeteda merupakan uraian lebih lanjut dari program pembangunan pembangunan daerah (propeda) yang berisikan visi, misi, program dan kegiatan serta periode (tahun) pelaksanaan kegiatan, instansi pelaksana terkait, serta indikator kinerja masing-masing program.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud ditetapkannya Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETEDA) Kabupaten Lampung Barat 2001-2005 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanan pembangunan secara bertahap dan terencana selama kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu tahun 2001 sampai dengan 2005.

Tujuannya adalah untuk memberikan sasaran, strategi, arah kebijaksanaan, serta program pembangunan dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang, sehingga visi dan misi Kabupaten Lampung Barat akan dapat terwujud.

## **II. ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal dilakukan untuk meninjau kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh segenap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama lima tahun ke depan. Melalui kajian ini (interaksi antara faktor internal dan eksterna), diperoleh strategi yang perlu dikembangkan dalam hal:

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strategi SO),
2. Mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan (strategi ST),
3. Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (strategi WO), dan
4. Mengatasi kelemahan untuk mengatasi tantangan (strategi WT).

Strategi yang akan ditempuh dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

### **2.1 STRATEGI MENGOPTIMALKAN KEKUATAN UNTUK MERAHAIH PELUANG (STRATEGI SO)**

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada segenap aparatur pemerintah, pelaku dunia usaha, dan seluruh unsur lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
2. Peningkatan kualitas diklat dan pengembangan kelembagaan kepemudaan dan olahraga.
3. Fasilitas program keluarga berencana (KB).
4. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat.
5. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah.
6. Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan, termasuk pemerintahn Pekon.

8. Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan.
9. Pembentukan, pembinaan, dan pengembangan lembaga masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
10. Penyuluhan KADARKUM.
11. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
12. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
13. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan.
14. Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.
15. Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
16. Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup.
17. Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis, dan
18. Pelaksanaan Pemilu yang jujur.

## **2.2 STRATEGI MENGOPTIMALKAN KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN (STRATEGI ST)**

1. Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas aparatur penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS),
3. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja,
4. Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah.

## **2.3 STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (STRATEGI WO)**

1. Pendidikan dan pelatihan aparatur negara dan dunia usaha,
2. Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik,
3. Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

4. Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM,
5. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan agama,
6. Penambahan tenaga guru agama,
7. Pengembangan/perbaikan sistem pendidikan agama,
8. Memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama,
9. Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ,
10. Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh,
11. Sosialisasi keluarga sakinah, UNDANG-UNDANG Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU tentang Zakat tahun 1999,
12. Penyukuhan hukum-hukum agama bagi masyarakat,
13. Pengadaan sarana dan prasarana peradilan agama,
14. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur peradilan agama,
15. Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata,
16. Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah,
17. Peningkatan sarana promosi kepariwisataan.

#### **2.4 STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN (STRATEGI WT)**

1. Perbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah,
2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis,
4. Pendidikan dan pelatihan kemampuan berorganisasi, berwirausaha, dan penguasaan IPTEK,
5. Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan),
6. Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis,

7. Fasilitas kemitraan agribisnis,
8. Promosi dan pengembangan investasi,
9. Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi, dan
10. Evaluasi peningkatan UMR/UMP.

### **III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **3.1 VISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang madani, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan melaksanakan pembangunan pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Masyarakat yang madani mengandung pengertian suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam suasana kebersamaan dan kerukunan antar sesama komponen masyarakat yang dinamis, demokratis, berbudaya, agamis, sejahtera dan berkeadilan.

Masyarakat yang berakhlak mulia mengandung pengertian telah terjadi penerapan nilai-nilai luhur yang bersumber pada moral keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat yang sejahtera mengandung pengertian kecukupan kebutuhan hidup dalam tatanan dan suasana masyarakat yang harmonis antar sesama komponen masyarakat.

Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengertian upaya sadar ke arah positif dalam mengelola sumber daya alam secara optimal dan arif dengan mempertimbangkan kaidah kelstarian lingkungan.

#### **3.2 MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Sesuai dengan visi tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan otonomi daerah untuk mencapai kemandirian masyarakat Lampung Barat,
2. Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum,
3. Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan,
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat,
6. Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan, dan
7. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya.

#### **IV. TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN**

##### **4.1 MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH**

###### **4.1.1 Tujuan**

Untuk meningkatkan kemandirian pembangunan Kabupaten Lampung Barat

###### **4.1.2 Sasaran**

1. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah
2. Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien

###### **4.1.3 Kebijakan**

1. Penguatan kelembagaan masyarakat
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat
4. Peninjauan kembalilembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan

##### **4.2 MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM**

#### **4.2.1 Tujuan**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN,
2. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan dinamis,
3. Menegakkan supremasi hukum.

#### **4.2.2 Sasaran**

1. Terciptanya aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang bersih,
2. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien,
3. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
4. Terselenggaranya sistem politik yang demokratis dan dinamis,
5. Tertatanya sistem hukum daerah,
6. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai dan stabil,
7. Terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional.

#### **4.2.3 Kebijakan**

1. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah, pelaku usaha (swasta), dan masyarakat,
2. Pengembangan sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien,
3. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi,
4. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis,
5. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum,
6. Penataan kelembagaan hukum daerah,
7. Peningkatan budaya KADARKUM,
8. Penegakan supremasi hukum yang berlebihan,
9. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

### **4.3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN**

#### **4.3.1 Tujuan**

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kemitraan,
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

#### **4.3.2 Sasaran**

1. Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4% per tahun,
2. Meratanya pendapatan per kapita sebesar Rp. 2.091.036,-
3. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan,
4. Terwujudnya kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi era globalisasi,
5. Terwujudnya keuangan daerah yang mampu membiayai pembangunan daerah.

#### **4.3.3 Kebijakan**

1. Peningkatan laju investasi
2. Intensifikasi, eksistensi, eksploitasi, dan rehabilitasi kegiatan ekonomi
3. Pengembangan UMR/UMP
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya tenaga kerja
5. Pengembangan agribisnis
6. Pengembangan kelembagaan pasar dan sistem informasi agribisnis
7. Pengembangan pola kemitraan agribisnis
8. Pengembangan kewirausahaan
9. Pengelolaan keuangan daerah
10. Pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)

### **4.4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

#### **4.4.1 Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang profesional,
2. Meningkatkan kalitas kepemudaan dan olah raga,
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk,
5. Memberdayakan peranan wanita dalam pembangunan,

6. Meningkatkan kualitas akhlak masyarakat.

#### **4.4.2 Sasaran**

1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang profesional,
2. Meningkatkan kalitas kepemudaan dan olah raga,
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,
4. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun,
5. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan,
6. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia,
7. Terwujudnya penegakan hukum agama.

#### **4.4.3 Kebijakan**

1. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan masyarakat
2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
3. Peningkatan aktivitas kepemudaan dan olah raga
4. Pelayanan kesehatan secara profesional
5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam proises pembangunan
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan agama
8. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan agama
9. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama
10. Peningkatan peran lembaga peradilan agama

### **4.5 MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT**

#### **4.5.1 Tujuan**

1. Pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lain yang berwawasan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

#### **4.5.2 Sasaran**

1. Termanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan,
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan,
3. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

#### **4.5.3 Kebijakan**

1. Peningkatan pemanfaatan alam secara optimal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
2. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan,3.Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **4.6 MENINGKATKAN KEBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN**

#### **4.6.1 Tujuan**

Meningkatkan keberdayaan kelembagaan adat dalam pembangunan

#### **4.6.2 Sasaran**

Terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan

#### **4.6.3 Kebijakan**

Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan

### **4.7 MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN YANG BEBASIS SUMBER-DAYA ALAM DAN BUDAYA DAERAH**

#### **4.7.1 Tujuan**

Meningkatkan peran kepariwisataan dalam pembangunan daerah

#### **4.7.2 Sasaran**

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan budaya daerah

#### **4.7.3 Kebijakan**

1. Pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya daerah sebagai objek wisata,
2. Pembinaan seni dan budaya daerah,
3. Promosi kepariwisataan

### **V. PROGRAM AKSI DAN INDIKATOR KINERJA**

Program aksi yang akan dilakukan oleh Dinas/Instansi se-Kabupaten Lampung Barat selama periode tahun 2001-2005 diuraikan dalam bentuk matriks indikator program, yang memuat uraian tentang Program Strategik Kabupaten, program/kegiatan, Dinas/Instansi terkait, tahun pelaksanaan, serta indikator kinerja pada masing-masing program/kegiatan.

Program strategik kabupaten pada matriks ini mengacu kepada Renstra Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, dan masing-masing program strategik selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk program-program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan alokasi waktu dan dana yang tersedia di kabupaten. Namun demikian bagi Dinas/Instansi yang bersifat vertikal dengan Pemerintah Pusat maka waktu pelaksanaan dan pendanaan disesuaikan dengan alokasi waktu dan pendanaan Pemerintah Pusat. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Daerah lebih detail akan dijabarkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas/Instansi yang bersangkutan.

Notas/symbol pada kolom tahun pelaksanaan memberikan makna sebagai berikut:

(0) = tidak dilaksanakan,

(x) = dilaksanakan dengan alokasi dana daerah, dan

(v) = dilaksanakan dengan alokasi dana Pemerintah Pusat.

## **VI. KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) merupakan pentahapan suatu proses pembangunan yang berdimensi waktu jangka pendek dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien agar hasil-hasil yang dicapai lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah:

1. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tahun 2001 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2005.
2. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Stratejik (RENSTRA) Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, dituangkan dalam Program Pembangunan daerah 5 (lima) tahun (Propeda) memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur.
3. Program Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun (Propeda) selanjutnya dirinci dalam rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat kegiatan-kegiatan beserta indikator kegiatannya akan dilaksanakan oleh setiap Dinas/Instansi dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing kegiatan dinas/instansi dijabarkan lebih luas dan lengkap dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas/Instansi Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, yang telah disusun oleh masing-masing Dinas/Instansi beserta stakeholdernya dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas/Instansi.

Untuk tahun pertama pelaksanaan Propeda Lampung Barat dalam tahun 2001-2005 kepada Bupati diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun program pembangunan daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah yang

memuat anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan Propeda Lampung Barat tahun 2001-2005, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disiapkan sebelumnya.

Berhasil dan tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk mencapai cita-cita bangsa secara keseluruhan, tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, itikad, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan, social politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut tugas pokok dan fungsi serta kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Propeda Lampung Barat.

## **VIII. PENUTUP**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Lampung Barat memuat program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ini disusun atas dasar kehendak rakyat dan cerminan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Oleh sebab itu masyarakat dan dunia usaha diharapkan mampu menjadi pelaku utama pembangunan daerah. Sedangkan pemerintah memberikan pengarahannya, bimbingan, serta menciptakan iklim yang menunjang tumbuh dan berkembangnya prakarsa, pemerataan, kesempatan, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.

Selain pemerataan kesempatan berperan aktif dalam pembangunan, hasil pembangunan pun harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Selanjutnya dengan adanya kesejahteraan lahir dan batin yang merata dan berkeadilan tentunya meningkatkan ketahanan nasional.

Diatas semua itu, pemahaman akan hakikat partisipasi, sikap mental, tekad, dan semangat serta ketaatan dan disiplin seluruh lapisan masyarakat serta dedikasi pemerintah sebagai penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Dinamika kondisi dan kemajuan masyarakat menuntut Program Pembangunan Daerah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan setiap lima tahun. Dengan demikian pembangunan yang akan dilakukan harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat, karena saat ini perubahan-perubahan dan perkembangan masyarakat berlangsung dengan sangat cepat. Di sisi yang lain, pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Dalam perjalanan waktu, isu-isu pembangunan daerah yang baru akan muncul, sehingga dalam aktivitas perencanaan lebih lanjut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi-strategi yang tidak relevan lagi. Oleh karena itu prioritas strategi perlu dievaluasi dan dimodifikasi. Pemantauan atas kinerja rencana-rencana yang telah dibuat, merupakan dasar bagi efektifitas evaluasi pengelolaan. Dalam implementasinya, strategi-strategi pembangunan daerah perlu direview setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh segenap unsur terkait (pemerintah dan *stakeholders*), dan revisi terhadap strategi dan isi dokumen RENSTRA setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

**MISI 1:**

**MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	2003	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembentukan, pembinaan, pengembangan lembaga masyarakat	1	Meningkatkan kelembagaan yang mendukung pemanfaatan/ penggunaan teknologi tepat guna (TTG)	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	Terbentuknya/berkembangnya kelembagaan yang mendukung penggunaan TTG di pekon
		2	Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan/pemanfaatan TTG	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	Meningkatnya program/ pemanfaatan TTG oleh masyarakat
		3	Peningkatan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pengembangan pemanfaatan TTG dan SDA	KANTOR PMD	0	x	x	0	0	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pengembangan/ pemanfaatan TTG dan SDA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembentukan, pembinaan, pengembangan lembaga masyarakat	4	Peningkatan peranserta kelembagaan LKMD dan BPP dalam perencanaan dan partisipasi pembangunan masyarakat desa	KANTOR PMD	x	x	x	x	x	Meningkatkan peran LKMD dan BPP (Badan Perwakilan Pekon) dalam perencanaan pemb. Pekon
		5	Peningkatan motivasi masyarakat dalam melaksanakan perubahan pembangunan	KANTOR PMD	0	x	x	0	0	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam pembangunan
		6	Pendataan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial sampai tingkat Pekon	DISNAKER & KESMAS	x	x	x	x	x	Adanya data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sampai tingkat pekon
		7	Pendataan PSKS sampai tingkat Pekon	DISNAKER & KESMAS	x	x	x	x	x	Tersedian data PSKS di seluruh wilayah kabupaten
		8	Intensifikasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	DISNAKER & KESMAS	0	0	x	0	0	Meningkatnya kualitas (PSKS) di seluruh wilayah kabupaten

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembentukan, pembinaan, pengembangan lembaga masyarakat	9	Peningkatan kuantitas dan pematapan institusi kemandirian PAKBD	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya keberdayaan PAKBD
		10	Peningkatan partisipasi keluarga PS dan KS I untuk menjadi anggota UPPKS	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya keberdayaan keluarga PS dan KS I
		11	Peningkatan kemampuan manajerial kelompok UPPKS	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas UPPKS di seluruh wilayah kabupaten
		12	Peningkatan kuantitas dan kualitas BKB, BKR, dan BKL	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya keberdayaan BKB, BKR, dan BKL dalam program KB
		13	Memfasilitasi peningkatan mutu produk UPPKS	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya mutu produk UPPKS
		14	Peningkatan keterampilan Provider sesuai SOP	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya keterampilan Provider

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	15	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan	DINAS PUK	0	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jalan
		16	Peningkatan kemampuan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi
		17	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan pemukiman	DINAS PUK	0	0	x	0	x	Meningkatan kesadaran masyarakat dlm. pemeliharaan lingk. pemukiman
		18	Peningkatan peran tokoh agama dalam memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dalam pembangunan	DINAS PUK	v	v	v	v	v	Meningkatnya kesadaran tokoh agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dalam pembangunan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	19	Peningkatan peran serta LSM dalam menegakkan moral agama dalam pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnyakesadaran LSM dalam menegakkan moral agama dalam pemerintahan
		20	Peningkatan kualitas pengelolaan lembaga keagamaan	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas lembaga keagamaan
		21	Peningkatan peran tokoh agama dalam mengeliminasi dampak negatif era reformasi, keterbukaan dan globalisasi yang salah dan destruktif	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnya kesadaran tokoh agama untuk menghilangkan dampak negatif era reformasi yang salah
		22	Peningkatan pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat dlm. penyuluhan kependudukan	DISPENDUK	0	0	x	x	x	Meningkatnya keberdayaan tokoh agama dan masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	23	Memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana alam	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	0	0	Meningkatnya penghimpunan dan penyaluran bantuan korban bencana alam
		24	Peningkatan pemberdayaan karang taruna, PSM, PSKS, eks Napi, serta Orsosmas lainnya dalam pembangunan	DISNAKET & KESMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran karang taruna, PSM, PSKS, eks Napi, serta Orsosmas dalam melaksanakan pembangunan
		25	Peningkatan peran LSM dalam program KB	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya Perasn serta LSM dalam melaksanakan Program KB
		26	Pemberdayaan forum komunikasi kesatuan bangsa	KESBANG-LINMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya forum komunikasi kesatuan bangsa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	27	Peningkatan peran serta masyarakat swasta dalam menciptakan ketertiban umum	POLPP	x	x	x	x	x	Terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat dan sekitarnya
		28	Peningkatan kerjasama antar kelompok tani dalam pembangunan pertanian / perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran antar kelompok tani dalam melaksanakan pembangunan
		29	Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan petani / nelayan dalam pembangunan perikanan/ kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan perikanan/ kelautan
		30	Pemberdayaan UPJA dan P3A dalam pembangunan pertanian	PERTANIAN	0	x	x	0	0	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	31	Optimalisasi peran penyuluh dan lembaga pekon dalam pengembangan data dan penyusunan program pertanian tanaman pangan dan hortikultura	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Tersedianya data dan bahan perencanaan program serta terlaksananya penyuluhan pertanian yang terarah dan terpadu
		32	Peningkatan kerjasama dengan lembaga swasta, LSM, dan tokoh masyarakat dalam penyuluhan kesehatan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya pemahaman masing-masing lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan
		33	Peningkatan kerjasama dengan lembaga swasta, LSM, dan tokoh masyarakat dalam penyuluhan kesehatan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan
		34	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan (Asuransi kesehatan)	KESEHATAN	0	x	x	x	x	Adanya kepastian terhadap jaminan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	35	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penggunaan sarana/ prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas sarana/prasarana kesehatan yang ada
		36	Meningkatnya kemitraan dengan swasta dalam pembangunan sarana/prasarana kesehatan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
		37	Memfasilitasi kemitraan dengan swasta dalam pembangunan sarana/prasarana pendidikan	DINAS P D K	0	x	x	x	x	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
		38	Memfasilitasi kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sarana/ prasarana kepariwisataan	PARIWISATA	x	x	x	x	x	Adanya kerjasama antara swasta dan masyarakat dalam membangun sarana/prasarana kepariwisataan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	39	Mengoptimalkan fungsi BAZ untuk menghimpun zakat dari wajib zakat	KANDEPAG	0	v	v	v	v	Meningkatnya jumlah zakat yang terhimpun dan penyaluran zakat sesuai ketentuan
		40	Peningkatan kualitas pengelolaan zakat	KANDEPAG	0	v	v	0	0	Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	41	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan sarana dan prasarana transportasi	PERHuBUNGAN	x	x	x	x	x	Adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam merencanakan sarana dan prasarana transportasi
		42	Peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional/ lembaga adat/ lembaga penelitian dalam WASDAL	BAPEDALDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan WASDAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	43	Peningkata koordinasi untuk efektivitas pelaksanaan WASDAL dengan berbagai instansi terkait	BAPEDALDA	x	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan an pelaksanaan program WASDAL antar dinas/ instansi terkait
		44	Peningkatan koordinasi penyuluhan tentang pembangunan berwawasan lingkungan dengan instasi terkait	BAPEDALDA	0	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan antar dinas/instansi terkait
		45	Pertemuan koordinasi antar dinas/instansi dalam pengaturan dan penataan peruntukan/ penggunaan lahan/tanah	BPN	v	v	v	v	v	Sinkronisasi perencanaan an pelaksanaan program pertanahan antar dinas/ instansi terkait
		46	Meningkatkan pembinaan dan koorinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan masyarakat desa	KANTOR PMD	x	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa antar dinas/instansi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	47	Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Diklat dan Litbang	DIKLAT-LITBANGDA	0	x	0	0	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program Diklat dan Litbang antar Dinas/Instansi
		48	Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Daerah secara berkala	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya frekwensi dan kualitas Rakor dengan instansi terkait minimal 3 kali dalam setahun
		49	Sosialisasi dan Diseminasi tentang Koordinasi dan Evaluasi kepada Dinas/Instansi dan masyarakat	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Peningkatan pemahaman kepada Dinas/Instansi dan masyarakat tentang pentingnya koordinasi dalam perencanaan
		50	Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan instansi dan Masyarakat	KESEHATAN DAN RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya frekuensi dan kualitas Rakor dengan instansi terkait minimal 3 kali dalam setahun

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	51	Peningkatan kerjasama dengan MUI, Ormas agama, dan tokoh agama dalam pemberdayaan wakaf dan zakat sebagai potensi ekonomi umat	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Peningkatan efektifitas pengelolaan wakaf dan zakat oleh lembaga terkait
		52	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kependudukan	DISPENDUK	0	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan pada dinas/instansi terkait
		53	Peningkatan kerjasama dengan lembaga lembaga terkait dalam pembangunan peternakan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan pada dinas/instansi terkait
		54	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan perusahaan swasta	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Keikutsertaan aparat dalam kegiatan dinas yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan swasta

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	55	Peningkatan koordinasi dengan lembaga SPSI, kursus keterampilan kerja swasta dan PJTKI dalam bidang ketenagakerjaan	DISNAKER & KESMAS	0	x	0	0	0	Sinkronisasi kegiatan diklat keterampilan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		56	Peningkatan koordinasi dengan pihak lain dalam pemberdayaan PMKS	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan PMKS antar dinas / instansi terkait
		57	Peningkatan kerjasama antara Diskoppendal dengan investor dalam maupun internasional	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Lampung Barat
		58	Peningkatan kerjasamadengan LSM, lembaga masyarakat, dan lembaga adat dalam usaha perlindungan hutan	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya peran serta LSM, lembaga masyarakat, dan lembaga adat dalam upaya perlindungan hutan.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	59	Melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum dalam usaha perlindungan hutan	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan hutan antar dinas/instansi terkait
		60	Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan SDA lainnya di dalam kawasan hutan	KEHUTANAN	0	0	0	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan SDA antar dinas/instansi terkait
		61	Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengawasan lingkup Pemerintahan Kabupaten	BAWASDA	x	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pengawasan pada lingkup pemerintahan kabupaten
		62	Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam peng-himpunan dan pemasyarakatan data statistik	BPS	0	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program statistik antar dinas/instansi terkait

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	63	Mengadakan kegiatan dialog antar lembaga kemasyarakatan	KESBANG-LINMAS	0	x	x	x	x	Terlaksananya kegiatan temu lembaga kemasyarakatan minimal 2 kali per tahun
		64	Pertemuan koordinasi antar instansi secara kontinyu dan periodik	POL PP	x	x	x	x	x	Percepatan pertukaran informasi dan laporan mengenai ketertiban umum di seluruh wilayah kabupaten
		65	Peningkatan koordinai dalam rangka penyerasian dan pemantapan program perikanan/kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	x	x	x	x	x	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan perikanan antar dinas / instansi terkait
		66	Peningkatan koordinasi dengan lembaa-lembaga terkait (lembaga desa, kecamatan, dinas/instansi) dalam pembangunan pertanian	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Terlaksananya pembangunan pertanian yang lebih efektif dan terarah serta didukung lembaga terkait

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	67	Peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam pembangunan perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Terlaksananya pembangunan perkebunan yang lebih efektif dan terarah serta didukung lembaga terkait
		68	Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kesehatan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya dukungan sektor terkait dalam pembangunan bidang kesehatan
		69	Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan pendidikan	DINAS PDK	x	x	x	x	x	Meningkatnya dukungan sektor terkait dalam pembangunan bidang pendidikan
		70	Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kepariwisataan	PARIWISATA	x	x	x	x	x	Meningkatnya dukungan sektor terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	71	Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Dinas Instansi dalam peningkatan sarana/prasarana perkantoran	BAG. UMUM	x	x	x	x	x	Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana / pra-sarana kedinasan
4	Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan	72	Restrukturisasi organisasi Kantor Satuan Pol PP	POL PP	0	x	0	0	0	Terpenuhinya keakuratan organisasi pada kantor satuan Pol PP
		73	Restrukturisasi organisasi dan TUPOKSI Dinas Kesehatan dan RSUD LIWA	KESEHATAN DAN RSUD LIWA	0	x	0	0	0	Meningkatnya kualitas manajemen Dinas mengarah kepada efisiensi dan efektifitas pencapaian TUPOKSI

**MISI 2: MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS DAN MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	2003	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1	Peningkatan kemampuan Tim Perencana Jalan Kabupaten	DINAS PUK	0	x	0	0	0	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan TPJK
		2	Pengembangan kualitas perencanaan jalan kabupaten	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kegiatan perencanaan jalan kabupaten
		3	Peningkatan kualitas aparat Dinas PUK	DINAS PUK	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparat dinas PUK
		4	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Dinas Perhubungan	PERHUBUNGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat Dinas Perhubungan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan aparaturn pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	5	Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jasa transportasi untuk mematuhi peraturan lalu lintas transportasi	PERHUBUNGAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan transportasi
		6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM / aparat Bapedalda	BAPEDALDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		7	Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat mengenai UU-PLH, syarat ekolabeling, dan upaya P3KL	BAPEDALDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan dan penguasaan aparat tentang UUPLH, syarat ekolabeling, dan upaya P3KL
		8	Pengiriman pegawai Bapenda dalam diklat fungsional dan teknis terkait sesuai kebutuhan	BAPENDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya keterampilan pegawai Bapenda
		9	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga teknis BPN	BPN	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga teknis BPN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM/aparat pembina	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM/aparat pembina
		11	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang pendidikan, latihan, penelitian, dan pengembangan	DIKLAT-LITBANGDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang pendidikan, latihan, penelitian, dan pengembangan
		12	Pelaksanaan kerjasama dalam diklat-litbang dengan pihak luar	DIKLAT-LITBANGDA	0	0	x	x	x	Adanya kerjasama dalam diklat-litbang dengan pihak luar
		13	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat-litbang	DIKLAT-LITBANGDA	0	x	x	x	0	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat-litbang
		14	Memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan, latihan, penelitian mandiri	DIKLAT-LITBANGDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya ketrampilan bagi aparat pemerintah

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Pelatihan aparat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	15	Peningkatan kualitas SDM aparat pembina	DIN. PERINDAG	x	x	0	0	0	Meningkatnya kualitas SDM aparat pembina
		16	Pendidikan lanjutan dan Diklat struktural bagi aparat Bappeda	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas SDM BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan
		17	Peningkatan wawasan dan kemampuan perencanaan pada sebagian Dinas/Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas SDM dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terintegratif
		18	Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas rumah sakit	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan fasilitas rumah sakit
		19	Peningkatan profesionalisme tenaga medis dan non medis	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas tenaga medis dan non medis

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	20	Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama kepada aparat dan masyarakat	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama kepada aparat dan masyarakat
		21	Sosialisasi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pada masyarakat	KANDEPAG	0	v	v	v	v	Terciptanya pemahaman UU Perkawinan dan keluarga sakinah pada masyarakat
		22	Sosialisasi tentang UU Pelayanan Haji kepada aparat, swasta dan masyarakat	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnya Pengetahuan aparat, swasta dan masyarakat tentang UU Pelayanan Haji
		23	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM/aparat dalam pelayanan kependudukan, Caapil dan pengembangan institusi KB	DISPENDUK	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM/aparat dalam pelayanan kependudukan, Caapil dan pengembangan institusi KB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	24	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilikan bukti dan keluarga yang sah	DISPENDUK	0	x	x	x	0	Meningkatnya jumlah permintaan blanko bukti dan keluarga yang sah (KTP, KK dan....)
		25	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparat Disnak dan Keswan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparat Disnak dan Keswan
		26	Pendidikan kader kelompok tani ternak	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya jumlah dan kualitas kader kelompok tani
		27	Peningkatan sarana penyuluhan peternakan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan peternakan
		28	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparat Disnak dan Keswan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparaturn pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	29	Sosialisasi program penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparat Disnak dan Keswan
30		Peningkatan kualitas aparaturn dan penggerak koperasi dan PKM	DESKO & PM	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas aparaturn dan penggerak koperasi dan PKM	
31		Peningkatan kualitas kader kelompok UPPKS	BKKBN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas kader kelompok UPPKS	
32		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	BKKBN	0	v	v	v	v	Menurunnya angka perkawinan usia muda	
33		Peningkatan keadaran masyarakat untuk usaha ekonomi produktif	BKKBN	0	v	v	v	v	Teraturnya jarak kelahiran anak pertama, kedua dan seterusnya	
34		Peningkatan peran suami dalam program KB	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan UPPKS, BKB, BKR dan BKL	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	35	Peningkatan kualitas dan kuantitas keluarga prasejahtera dan KSI dalam program KB Nasional	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya usaha ekonomi produktif, pendapatan dan kesejahteraan keluarga
		36	Peningkatan kesadaran masyarakat akan 8 fungsi keluarga	BKKBN	0	v	v	v	v	Diterapkannya kegiatan GISS dalam kehidupan keluarga
		37	Pencegahan terhadap peserta KB yang Drop Out	BKKBN	0	v	v	v	v	Rendahnya peserta KB yang Drop Out
		38	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksanaan pendataan R/R	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya cakupan dan validitas data
		39	Peningkatan kualitas SDM lini lapangan tentang pencatatan dan pelaporan (R/R)	BKKBN	v	v	v	v	v	Tepatnya kebijaksanaan dan perencanaan tentang Keluarga Berencana
		40	Peningkatan kualitas SDM satgas Linmas	BKKBN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas SDM satgas Linmas

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	41	Pembekalan tekhnis anggota Pol PP	POL PP	x	x	x	x	x	Meningkatnya keterampilan anggota Pol PP
		42	Penyuluhan dan pelatihan pengendalian OPT kepada masyarakat	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Semakin meluasnya pengendalian OPT yang berwawasan lingkungan
		43	Penyuluhan dan pembinaan peningkatan mutu komoditas perkebunan	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang peningkatan mutu komoditas perkebunan
		44	Pembinaan kelompok tani di bidang usaha tani perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya keterampilan kelompok tani di bidang usaha tani perkebunan
		45	Meningkatkan kualitas aparat dalam menumbuhkan kewirausahaan bidang perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas aparat dalam menumbuhkan kewirausahaan bidang perkebunan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	46	Peningkatan kualitas SDM/ aparatur bidang perikanan/ kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas SDM / aparatur bidang perikanan/kelautan
		47	Peningkatan kualitas SDM/ aparatur bidang kepariwisataan	PARIWISATA	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas SDM/ aparatur bidang kepariwisataan
		48	Pembinaan dan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya keberdayaan kelompok tani dalam pembangunan pertanian
		49	Pembekalan teknis Peratin LHP dan perangkat Pekon	BAG. OTDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya keberdayaan Peratin LHP dan perangkat Pekon dalam pelaksanaan pemerintahan desa
		50	Optimalisasi pembinaan dan pemanfaatan BPP	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya daya dukung petugas dalam melaksanakan penyuluhan pertanian

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	51	Peningkatan kualitas SDM/ aparat Dinas Pertanian	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas aparat dalam pembinaan dan perencanaan pembangunan pertanian
		52	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	KESEHATAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		53	Peningkatan kualitas tenaga kependidikan	DINAS PDK	x	x	x	x	x	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan
		54	Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pengelolaan keuangan daerah	BAG. KEUANGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta profesionalisme aparat pengelola keuangan daerah
		55	Memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin secara gratis	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kesehatan masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	56	Pembinaan dan pengembangan Tilawatil Quran	BAG. KEMASYARAKATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya pemahaman, pengamalan dan kemampuan membaca Al - quran oleh masyarakat
		57	Pembinaan kerukunan antar umat beragama	BAG. KEMASYARAKATAN	x	x	x	x	x	Menurunnya angka perselisihan antar umat beragama
		58	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	BAG. PEM. PEREMPUAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	59	Penyusunan RAPETADA	BAPPEDA	x	0	0	0	x	Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan daerah secara menyeluruh
		60	Evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pertanian, & kesehatan	BAPPEDA	0	0	x	0	0	Perumusan standar pelayanan minimal bidang pendidikan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	61	Revisi RT/RW Kabupaten 2001-2005	BAPPEDA	x	0	0	0	0	Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang lebih representatif mempertimbangkan berbagai kepentingan
		62	Rencana Tata Ruang pengelolaan Wilayah Pesisir	BAPPEDA	x	0	0	0	0	Perencanaan tata ruang wilayah pesisir yang lebih representatif mempertimbangkan berbagai kepentingan
		63	Inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan	BAPPEDA	0	x	x	0	0	Terhimpunnya data kondisi (kualitas dan kuantitas) sarana/ prasarana pendidikan sebagai dasar perencanaan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	64	Inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Terhimpunnya data kondisi (kualitas dan kuantitas) sarana/ prasarana kesehatan sebagai dasar perencanaan
		65	Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Kawasan Lindung dan Budidaya	BAPPEDA	0	0	x	0	0	Tersedianya data sebagai dasar perencanaan detil wilayah kawasan lindung dan budidaya
		66	Penyusunan Rencana Tat Ruang Kawasan Desa/Kota	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data sebagai dasar perencanaan detil wilayah kawasan desa/ kota
		67	Penyusunan program jangka menengah (PJM) Kota Way Tenong dan Pugung Tampak	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Adanya pentahapan pengembangan kota Way Tenong dan Pugung Tampak

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	68	Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kawasan Tertinggal (Enclae)	BAPPEDA	0	0	0	x	0	Tersedianya data sebagai arahan program pembangunan kawasan tertinggal (enclave)
		69	Evaluasi proyek dan Program-program Pembangunan	BAPPEDA	0	x	x	x	x	Inventarisasi pelaksanaan proyek dan program pembangunan faktor-faktor penentu keberhasilan
		70	Penyusunan Master Plan Pariwisata	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data dalam perencanaan pembangunan pariwisata Lampung Barat yang handal
		71	Studi kelayakan Pengembangan Wisata Danau Ranau	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data teknis dan proyeksi finansial dalam pengembangan pariwisata Danau rana

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	72	Strategi pemasaran Wisata daerah Lampung Barat	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Pencapaian market share potensi wisata yang lebih luas
		73	Peningkatan efektifitas dan efisiensi mekanisme kerja aparat di tingkat Pekon dan kecamatan dalam bidang kependudukan	DISPENDUK	0	x	0	0	0	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja aparat di tingkat Pekon dan kecamatan dalam bidang kependudukan
		74	Pengembangan sistem informasi yang berkualitas dan publikasi kependudukan yang sistematis	DISPENDUK	0	0	0	x	x	Meningkatnya sistem informasi yang berkualitas dan publikasi kependudukan yang sistematis
		75	Peningkatan kemampuan aparat dan LSM di tingkat Pekon dan Kecamatan	DISPENDUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kemampuan aparat dan LSM di tingkat Pekon dan Kecamatan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	76	Pengembangan sistem pengawasan koperasi, UKM, dan enanaman modal	DISPENDUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kemampuan sistem pengawasan koperasi, UKM, dan penanaman modal
		77	Pemberdayaan Badan Pengawas dan Akuntan Publik	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Meningkatnya Keberdayaan Badan Pengawas dan Akuntan Publik
		78	Peningkatan mutu audit lembaga pemerintahan	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Terciptanya mutu audit lembaga pemerintahan yang lebih efisien
		79	Ekspose evaluasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan	BAWASDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya dukungan dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan
		80	Peningkatan respon pengawasan/pengaduan dan masyarakat	BAWASDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	81	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan statistik	BPS	0	x	x	x	x	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan statistik
		82	Pengembangan sistem informasi data statistik	BPS	0	x	x	x	x	Berkembangnya informasi data statistik
		83	Peningkatan mutu sistem informasi manajemen kepegawaian	BAG. KEPEGAWAIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya mutu sistem informasi manajemen kepegawaian
		84	Pengembangan sistem informasi manajemen dan akuntansi keuangan daerah	BAG. KEUANGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya sistem informasi manajemen dan akuntansi keuangan daerah
		85	Penertiban administratif pemerintahan kecamatan dan evaluasi serta pemantapan tugas pemerintahan pekon dan kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan LHP	BAG. OTDA DAN BAG. TATA PRAJA	x	x	x	x	x	Administratif pemerintahan kecamatan lebih teratur dan tersusunnya rencana pemerintahan Pekon dan kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan LHP

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis	86	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi UU bidang politik	KESBANG-LINMAS	0	x	x	0	0	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang politik
4	Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87	Mengusulkan kebijakan daerah yang mendukung terciptanya lingkungan sehat	KESEHATAN	0	x	0	0	0	Meningkatnya dukungan dan pemantapan pelaksanaan program lingkungan sehat
		88	Revisi PERDA tentang retribusi pelayanan kesehatan	KESEHATAN & RSUD LIWA	0	x	0	0	0	Tersusunnya PERDA retribusi pelayanan kesehatan yang representatif
		89	Sosialisasi PERDA	BAG. HUKUM	x	x	x	x	x	Meningkatnya pemasyarakatan PERDA keseluruhan wilayah kabupaten
		90	Pengadaan Tim Perumus Perda/ Keputusan Bupati dan perjanjian kerjasama	BAG. HUKUM	x	x	x	x	x	Tersusunnya perumusan sistem informasi manajemen dan akuntansi keuangan daerah

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	91	Revisi PERDA dan penyusunan uraian tugas	BAG. ORGANISASI	x	x	x	x	x	Adanya perbaikan/ Perumusan Perda dan penyusunan uraian tugas
		92	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keuangan Daerah	BAG. KEUANGAN	0	0	x	x	x	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi lebih baik
5	Pelaksanaan PEMILU yang JURDIL	93	Pelaksanaan PEMILU		0	0	0	x	0	Terlaksananya PEMILU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	94	Peningkatan penerapan sanksi sesuai UU PLH	BAPEDALDA	0	x	x	x	x	Menurunnya angka pelanggaran UUPH
		95	Penerapan sanksi secara tegas terhadap WP dan WR	BAPENDA	x	x	x	x	x	Terciptanya Kedisiplinan pada instansi terkait
		96	Evaluasi terhadap pegawai/ aparat Bapenda yang menyalahgunakan wewenang	BAPENDA	x	x	x	x	x	Terwujudnya aparat/ pegawai yang lebih efektif dan mementingkan masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	97	Memberikan kepastian atas hak penguasaan dan pemilikan tanah	BPN	v	v	v	v	v	Adanya perencanaan data detail atas kepemilikan tanah
		98	Penerbitan SK pemberian hak atas tanah	BPN	v	v	v	v	v	Tersusunnya data program pertanahan yang lebih efisien
		99	Pensertifikatan tanah massal secara swadaya	BPN	v	v	v	v	v	Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah
		100	Pengumpulan dan penghimpunan data teknis dan yuridis	BPN	v	v	v	v	v	Terpenhinya data-data yan akurat untuk perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum
		101	Pemutahiran data teknis dan yuridis	BPN	v	v	v	v	v	Tersedianya dan terpeliharanya sistem inormasi dan data pertanahan yang mutakhir

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	102	Fasilitas kegiatan TMD	KANTOR PMD	x	x	x	x	x	Terpenuhinya fasilitas-fasilitas kegiatan TMD
		103	Fasilitasi DPD/K dan BOP	KANTOR PMD	x	x	x	x	x	Terpenuhinya Fasilitas-Fasilitasi DPD/K dan BOP
		104	Penyuluhan tentang UU Perlindungan Konsumen, UU Metrologi legal, HAKI dan	DIN. PERINDAG	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan tentang UU Perlindungan Konsumen, UU Metrologi legal, HAKI dan
		105	Peningkatan sarana dan prasarana kerja lembaga	BAWASDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kerja lembaga
		106	Mendorong dilaksanakannya penegakan hukum dalam pelanggaran norma agama untuk membentuk pemerintahan yang bebas KKN	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Terciptanya pemerintahan yang bebas KKN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	107	Pelaksanaan penyuluhan tentang larangan pencurian kayu, dan pengendalian kebakaran hutan	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Terciptanya keamanan dan terkendalinya keadaan hutan
		108	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perlindungan hutan	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perlindungan hutan
		109	Pembinaan perburuan tradisional	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya pemahaman para pemburu tradisional
		110	Penertiban peredaran hasil hutan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Terciptanya peredaran hasil hutan yang lebih efisien
		111	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan	KEHUTANAN	0	x	0	0	0	Berkurangnya perusakan hutan oleh masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	112	Sosialisasi Perda kepada aparaturnya dan masyarakat	POL PP	x	x	x	x	x	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparaturnya daerah dalam melaksanakan Perda
		113	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas POL PP	POL PP	x	x	x	x	x	Meningkatnya aktifitas kegiatan/tugas POL PP
		114	Peningkatan pengawasan, pembinaan, pengadaan, dan peredaran pupuk dan pestisida	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Minimalisasi penyebaran dan peredaran sasprodi yang tidak berkualitas (aspal)
7	Penyuluhan KADARKUM	115	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merelakan sebagian miliknya yang terkena proyek pembangunan	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnyasadaran masyarakat untuk merelakan sebagian miliknya yang terkena proyek pembangunan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penyuluhan KADARKUM	116	Pelatihan tenaga bantuan hukum	BAG. HUKUM	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga bantuan hukum
		117	Penyuluhan hukum terpadu	BAG. HUKUM	x	x	x	x	x	Terciptanya kesadaran akan hukum terpadu
		118	Pengadaan perpustakaan umum	BAG. HUKUM	0	x	x	0	0	Tersedianya kebutuhan atau data-data tentang hukum
8	Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat	119	Mencegah timbulnya perselisihan/sengketa dalam kepemilikan dan penguasaan tanah	BPN	v	v	v	v	v	Terselenggaranya penyelesaian masalah pertanahan
		120	Penyelesaian masalah pertanahan	BPN	v	v	v	v	v	Terwujudnya pengaturan penguasaan/pemilikan dan penataan tanah yang berkeadilan
		121	Penyuluhan pertanahan melalui berbagai media	BPN	v	v	v	v	v	Meningkatnya pengetahuan masyarakat luas tentang pertanahan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat	122	Pelaksanaan patroli dalam rangka pemantauan situasi dan kondisi umum daerah	POL PP	x	x	x	x	x	Terciptanya rasa aman bagi masyarakat
		123	Operasi lapangan penertiban pelaksanaan Perda	POL PP	x	x	x	x	x	Terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan perda
9	Peningkatan kualitas aparatur penegak hukum dan penyidik PNS	124	Peningkatan mutu pengawasan	BAWASDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas kegiatan instansi/ departemen
		125	Peningkatan mutu perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan program kerja dan pelaksanaan pengawasan	BAWASDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya mutu / kualitas Bawasda

**MISI 3:****MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	2003	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Promosi dan pengembangan investasi	1	Pemeliharaan sarana transportasi yang berkesinambungan	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas sarana transportasi di seluruh wilayah kabupaten
		2	Peningkatan promosi keuangan dan potensi Lampung Barat	DIN. PERINDAG	0	x	x	x	x	Adanya pemahaman masyarakat tentang potensi Lampung Barat
		3	Peningkatan promosi investasi	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Meningkatnya para investor yang datang ke Lampung Barat
		4	Penyertaan modal saham pasia BPD Capem LIWA	BAG. KEUANGAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya pembangunan Lampung Barat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	5	Memfasilitasi pengembangan modal usaha bagi masyarakat dalam pemanfaatan TTG dan SDA	KANTOR PMD	0	x	x	x	0	Meningkatnya modal usaha bagi pengguna/ pemanfaat TTG dan SDA
		6	Pengadaan alat peraga bidang TTG	KANTOR PMD	0	x	x	x	0	Meningkatnya ketersediaan alat peraga TTG
		7	Peningkatan prasarana pendukung kegiatan bid. Pendidikan, Perdagangan, Kesehatan, Pemerintahan, dan Pariwisata	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal prasarana pendukung kegiatan bid. Pendidikan, perdagangan, kesehatan
		8	Perencanaan teknis keciptakaryaan	DINAS PUK	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas teknis perencanaan keciptakaryaan
		9	Inventarisasi, eksploitasi, eksplorasi, dan ekstensifikasi potensi sumberdaya air dan jaringan irigasi	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya jangkauan pelayanan irigasi dan pengembangan potensi sumberdaya air

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	10	Perencanaan teknis pengairan	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Perencanaan teknis pengairan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
		11	Peningkatan efisiensi jaringan irigasi	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi selama musim tanam
		12	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana transportasi	PERHUBUNGAN	x	x	x	x	x	Terciptanya kondisi aman berlalu lintas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
		13	Peningkatan akurasi data sarana dan prasarana transportasi	PERHUBUNGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas perencanaan transportasi
		14	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat	PERHUBUNGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya aksesibilitas menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	15	Perencanaan jaringan transportasi dan pengaturan sarana angkutan umum	PERHUBUNGAN	x	x	x	x	x	Tertatanya modal transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat
		16	Pengaturan luas penguasaan/pemilikan tanah negara	BPN	v	v	v	v	v	Meningkatnya luas tanah produktif sebagai salah satu sumber pengembangan perekonomian daerah
		17	Pelaksanaan redistribusi tanah-tanah obyek landreform	BPN	v	v	v	v	v	Terdistribusi tanah-tanah obyek landreform
		18	Inventarisasi tanah negara dan penegasan tanah negara	BPN	v	v	v	v	v	Terdatanya tanah-tanah milik negara
		19	Pelaksanaan konsolidasi tanah	BPN	v	v	v	v	v	Terlaksananya konsolidasi tanah
		20	Pelaksanaan pendataan dan pemantauan tanah obyek landreform	BPN	v	v	v	v	v	Terdata dan terpantaunya penggunaan tanah obyek landreform

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	21	Pengumpulan data-data penggunaan tanah dan perencanaan peruntukan penggunaan tanah	BPN	v	v	v	v	v	Terhimpunnya data penggunaan tanah dan perencanaan peruntukan tanah
		22	Penyusunan neraca penggunaan tanah	BPN	v	v	v	v	v	Tersusunnya neraca penggunaan tanah tahunan
		23	Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai prosedur, cepat dan tepat waktu	BPN	v	v	v	v	v	Meningkat dan cepatnya pelayanan masalah pertanahan
		24	Pendaftaran tanah secara sistematis perpekon secara lengkap dan swadaya	BPN	v	v	v	v	v	Terdaftarnya status kepemilikan tanah di setiap Pekon
		25	Fasilitasi pengoptimalan pemanfaatan SDA	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	Optimalisasi penggunaan SDA berkelanjutan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	26	Pengkajian pengembangan produk yang diminati pasar bebas	DIKLAT-LITBANGDA	0	x	0	x	0	Jumlah (kuantitas) dan kualitas produk yang dapat menembus pasar bebas
		27	Penelitian dan pengembangan penerapan TTG	DIKLAT-LITBANGDA	0	0	x	0	x	Semakin berkembangnya penerapan TTG dalam mendukung proses produksi masyarakat
		28	Pengkajian penelitian dan pengembangan cabang-cabang ekonomi	DIKLAT-LITBANGDA	0	0	x	0	x	Meningkatnya jumlah cabang-cabang ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat
		29	Penyusunan Lampung Barat dalam angka	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Tersusunnya data potensi Kabupaten Lampung Barat sebagai dasar perencanaan
		30	Penyusunan PDRB	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Tersedianya data dan informasi situasi pendapatan masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	31	Penyusunan Data Pokok Pembangunan	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Tersedianya data pokok pembangunan daerah
		32	Pembuatan Peta Jaringan Jalan Kabupaten	BAPPEDA	0	x	x	x	x	Tersedianya data dan informasi situasi jalan kabupaten
		33	Penyusunan Rencana Induk Transportasi dan Komunikasi	BAPPEDA	0	0	x	0	0	Tersedianya data sebagai arah pengembangan sistem transportasi dan komunikasi
		34	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data dasar penataan ruang wilayah strategis pengembangan
		35	Penyusunan neraca sumber daya Alam dan Sumber Daya Buatan Kabupaten Lampung Barat	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersusunnya potensi investasi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	36	Penyusunan Profil Investasi Lampung Barat	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersusunnya potensi investasi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat
		37	Penyusunan Produk Unggulan Daerah	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersusunnya data basis data pengembangan produk unggulan daerah
		38	Pengkajian spesifikasi wilayah pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rakyat	BAPPEDA	0	0	0	x	0	Tersedianya data dalam perencanaan pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rakyat
		39	Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas potensi Lampung barat secara terpadu	BAPPEDA	x	x	x	x	x	Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat nerbasis kompetensi lokal secara terpadu
		40	Peningkatan pelayanan prima bidang kesehatan ternak dan hewan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya produktivitas hasil ternak petani

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	41	Peningkatan pembinaan dan pengawasan tentang keswan dan kesmavet	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan tentang kesmavet dan kesehatan ternak
		42	Peningkatan pembinaan ternak Pemerintah	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan peternakan
		43	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	DISNAK & KESWAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
		44	Peningkatan kerjasama dengan peternak dalam pemanfaatan plasma nutfah	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Berkembangnya pemanfaatan plasma nutfah ternak
		45	Penyusunan peta wilayah sentra pengembangan ternak unggulan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	0	0	Tersedianya data dalam perencanaan pengembangan ternak unggulan
		46	Peningkatan pemanfaatan SDA lokal dalam pengembangan ternak	DISNAK & KESWAN	0	x	x	0	0	Meningkatnya kegiatan budidaya aneka ternak dan hewan spesifik

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	47	Peningkatan fasilitas kelompok tani dalam usaha peternakan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya keberdayaan kelompok tani dalam usaha peternakan
		48	Fasilitasi permodalan bagi usaha peternakan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya akses peternak dengan lembaga keuangan
		49	Standarisasi kualitas produk peternakan, produk asal ternak, dan mutu pakan ternak	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas produk peternakan, produk asal ternak, dan mutu pakan ternak
		50	Peningkatan pelayanan usaha kepada anggota koperasi dan masyarakat	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Meningkatkan hasil usaha koperasi & PKM
		51	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana koperasi, PKM, dan penanam modal	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Pelayanan terhadap usaha anggota dan masyarakat meningkat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	52	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sumberdaya alam	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Peningkatan sarana produksi dan hasil sumberdaya alam
		53	Pengusulan perubahan fungsi hutan / status kawasan	KEHUTANAN	0	x	x	0	0	Meningkatnya kerjasama kemitraan
		54	Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang RLKT dan berkurangnya lahan kritis didalam kawasan hutan
		55	Peningkatan penganekaragaman produk unggulan sesuai potensi wilayah	BKKBN	x	x	x	x	x	Meningkatnya produktivitas lahan perkebunan
		56	Intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi lahan untuk meningkatkan produktivitas	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya produktivitas lahan perkebunan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	57	Peningkatan peran petugas dalam pelaksanaan intensifikasi tanaman perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang perkebunan
		58	Penggunaan bibit bermutu untuk mengembangkan komoditas perkebunan	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya produktivitas lahan perkebunan
		59	Pemanfaatan entrys kopi dari kebun induk untuk melaksanakan intensifikasi pekebunan kayu	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya produktivitas kopi Lampung Barat
		60	Pemafaatan laboratorium untuk menanggulangi serangan OPT	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Berkurangnya tingkat serangan hama dan OPT lainnya dalam budidaya perkebunan
		61	Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu komoditas erkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya mutu produk kopi Lampung Barat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	62	Penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas produk perkebunan Lampung Barat
		63	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana informasi di tingkat petani/kelompok tani	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Percepatan penyebaran informasi pertanian ke seluruh petani/kelompok tani
		64	Pengembangan keanekaragaman bahan pangan	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
		65	Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan penanganan pasca panen	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Terlaksananya modernisasi pertanian dan penanganan pasca panen
		66	Pengembangan pola tanam	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya penguasaan petani dalam penerapan pola tanam dan diversifikasi tanam

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	67	Peningkatan kualitas pelayanan pada jalan-jalan strategis	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas jalan-jalan strategis di seluruh wilayah kabupaten
		68	Perluasan pelayanan jaringan jalan ke sentra produksi masyarakat	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya ruas dan panjang jalan ke sentra produksi masyarakat
3	Evaluasi peningkatan UMR /UMP	69	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya taraf upah yang diterima tenaga kerja
		70	Peningkatan taraf hidup keluarga pra sejahtera		0	x	x	x	x	Berkurangnya jumlah keluarga kategori PS dan KS 1
4	Pendidikan dan latihan keterampilan tenaga kerja	71	Pendidikan keterampilan penggunaan TTG kepada masyarakat	DIKLAT-LITBANGDA	0	x	x	x	x	Semakin meluasnya penerapan dan penggunaan TTG oleh masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pendidikan dan latihan keterampilan tenaga kerja	72	Peningkatan keterampilan tenaga pencari kerja	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Semakin berkurangnya jumlah atau angka pengangguran
		73	Sosialisasi persyaratan lingkungan kerja	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya K3 dalam lingkungan kerja
		74	Perluasan informasi peluang kerja keluar daerah	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersalurkan
		75	Pemberdayaan penyandang cacat sesuai kemampuan	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya keberdayaan penyandang cacat dalam pembangunan
		76	Peningkatan pembinaan anak nakal dan anak jalanan	DISNAKER & KESMAS	0	x	x	x	x	Semakin berkurangnya jumlah anak nakal dan anak jalanan yang tidak produktif
		77	Peningkatan keterampilan bagi anak putus sekolah	DISNAKER & KESMAS	x	x	x	x	x	Berkurangnya jumlah anak putus sekolah yang tidak bekerja

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Perancangan sistem agribisnis potensial	78	Perancangan sistem agribisnis/ komoditi potensial terpadu antar instansi terkait dan dunia usaha	DIN. PERINDAG	0	x	x	x	0	Terbentuknya pola pengembangan sistem agribisnis komoditi potensial Lampung Barat
		79	Penyusunan Pewilayah Komoditas Pertanian	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data dalam perencanaan pengembangan dan perwilayahan komoditi pertanian
		80	Studi Pola Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data bagi pengembangan ekonomi kerakyatan
		81	Studi Calon Basis Konsentrasi Nelayan wilayah Pesisir Kabupaten Lampung barat	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Tersedianya data bagi pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Lampung Barat
		82	Pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Terbentuknya sentra-sentra pengembangan komoditas unggulan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Perancangan sistem agribisnis potensial	83	Peningkatan pengembangan agribisnis ternak unggulan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya produk agribisnis ternak unggulan
		84	Peningkatan sarana dan prasarana agribisnis ternak	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan agribisnis ternak
		85	Pengembangan sistem agribisnis perikanan dan kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya produk agribisnis perikanan dan kelautan
		86	Pemberdayaan petani dalam pengadaan lumbung-lumbung pangan	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Tersedianya cadangan pangan di tiap kelompok/desa
6	Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis	87	Pemantauan harga dan komoditas potensial dan kebutuhan pokok	DIN. PERINDAG & BAG. PEREKONOMIAN	0	x	x	x	x	Keseimbangan antara jumlah produk yang dipasarkan dengan harga
		88	Pembangunan Pusat/Perkampungan sentra penjual produk UKM-INDAG	DIN. PERINDAG	0	x	x	x	x	Meningkatnya jumlah produk UKM-INDAG yang dapat dipasarkan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis	89	Penyajian data yang cepat dan akurat menggunakan sistem informasi modern	BAPPEDA	0	0	x	x	x	Meningkatnya aksesibilitas informasi perencanaan pembangunan ke seluruh dinas/instansi
		90	Pembangunan sistem informasi pasar ternak/agribisnis ternak unggulan	DISNAK & KESWAN	0	0	x	x	x	Percepatan aksesibilitas informasi pemaaran ternak dan hasil ternak Lampung Barat
		91	Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Percepatan aksesibilitas informasi pemaaran hasil Perkebunan Lampung Barat
		92	Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar sistem informasi perkebunan	PERKEBUNAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi perkebunan
		93	Peningkatan optimalisasi data ketahanan pangan	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Terwujudnya perencanaan yang handal dalam mewujudkan ketahanan pangan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis	94	Penyusunan dan pengelolaan data pertanian terpadu	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Tersedianya data sebagai bahan perencanaan pengembangan pertanian
		95	Peningkatan kerjasama dengan lembaga lembaga terkait (BPS, BPTP, PT, dll) dalam pengembangan data	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Tersedianya bahan evaluasi dan perencanaan dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian
		96	Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya aksesibilitas Informasi Dinas Pertanian
		97	Penyusunan dan pengelolaan Sistem Informasi Pemasaran	PERIKANAN DAN KELAUTAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kegiatan agribisnis perikanan
		98	Penyediaan data informasi agribisnis ternak	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kegiatan agribisnis ternak

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Fasilitasi kemitraan agribisnis	99	Pengembangan pola kemitraan usaha	DIN. PERINDAG	0	x	x	x	x	Meningkatnya kemitraan usaha di Lampung Barat
		100	Peningkatan kerjasama usaha koperasi, PKM, BUMD, dan Swasta	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dan PKM
		101	Fasilitasi kerjasama kemitraan antara petani dengan investor	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya usaha perkebunan rakyat dan pemasaran hasil-hasilnya
		102	Fasilitasi kemitraan dengan swasta yang bergerak di bidang pertanian dengan kelompok	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian
		103	Fasilitasi pengembangan bengkel asintan	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya ketersediaan asintan di tingkat petani/kelompok tani
		104	Pemberdayaan kelembagaan kemitraan peternak dalam penerapan IB dan teknologi peternakan	DISNAK & KESWAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya produktifita ternak dan hasil ternak

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah	105	Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa (PEMD)	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa
		106	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelestarian program	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	Berkembangnya kegiatan program pembangunan masyarakat desa
		107	Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan perkreditan	KANTOR PMD	0	x	0	x	0	Optimalnya pemanfaatan kredit dalam kegiatan usaha masyarakat
		108	Peningkatan kewirausahaan bagi UKM-INDAG	DIN. PERINDAG	0	x	x	x	0	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UKM-INDAG
		109	Studi Kinerja Koperasi guna mendukung pengembangan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah	BAPPEDA	0	0	x	x	0	Tersedianya data sebagai dasar pengembangan usaha perkoperasian dan UKM
		110	Pembinaan manajemen koperasi perkebunan	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Berkembangnya kegiatan koperasi perkebunan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah	111	Pengembangan organisasi kelompok usaha tani dan nelayan	PERIKANAN & KELAUTAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas organisasi kelompok usaha tani dan nelayan
		112	Sosialisasi aturan main atau kelembagaan Koperasi kepada anggota dan masyarakat	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan perkoperasian di seluruh wilayah kabupaten
9	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	113	Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola sumber pendapatan daerah	BAPENDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
		114	Pengendalian dan pendataan administrasi keuangan dan pembangunan daerah	BAG. KEU. & BAG. PEMB	x	x	x	x	x	Meminimalkan resiko kesalahan administrasi keuangan daerah dan penyimpangan/ manipulasi data
		115	Studi banding pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah	BAG. KEUANGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kinerja aparatur keuangan daerah

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Optimalisasi sumber-sumber PAD	116	Peningkatan kualitas pendataan, penilaian, dan penetapan serta penagihan	BAPENDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan PAD
		117	Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru	BAPENDA	x	x	0	x	0	Meningkatnya potensi PAD Lampung Barat
		118	Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dari luar daerah	BAPENDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya potensi PAD Lampung Barat
		119	Evaluasi data obyek dan subyek pendapatan daerah secara subyektif	BAPENDA	x	x	x	x	x	Terdapatnya keadilan dalam pendapatan obyek dan subyek sumber PAD
		120	Penyuluhan terhadap WP/WR tentang fungsi dan pentingnya pajak, retribusi, dan PBB	BAPENDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya jumlah PAD Lampung Barat
		121	Peningkatan sarana dan prasarana pendataan serta penagihan	BAPENDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kinerja pegawai/petugas penataan dan penagihan pajak dan retribusi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Optimalisasi sumber-sumber PAD	122	Monitoring dan evaluasi hasil pendataan pajak daerah, teribus daerah, dan PBB	BAPENDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya penerimaan daerah
		123	Inventarisasi dan penggalian sumber-sumber PAD	BAPENDA	x	0	0	0	0	Tersedianya data sebagai dasar perencanaan pengembangan dan penggalian sumber-sumber PAD
		124	Peningkatan pelayanan prima kependudukan	DISPENDUK	0	x	x	x	0	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan

**MISI 4:**

**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	2003	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat	1	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang UU-PLH dan kerusakan lingkungan	BAPEDALDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan
		2	Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan motivasi swadaya gotong royong	KANTOR PMD	x	x	x	x	x	Meningkatnya motivasi dalam pelaksanaan swadaya gotong royong
		3	Bimbingan teknis administrasi keuangan daerah	BAG. KEUANGAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya akuntabilitas administrasi keuangan daerah
2	Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah	4	Peningkatan sarana dan prasarana fisik pendidikan formal pada sekolah umum dan kejuruan	DINAS PDK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan jangka pelayanan pendidikan umum dan kejuruan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan	DINAS PDK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pendidikan anak didik
		6	Pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan luar sekolah	DINAS PDK	x	x	x	x	x	Tumbuh dan berkembangnya potensi kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan, dan Dik-lusenas.
3	Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwiraswasta, dan pengembangan IPTEKS	7	Pengembangan SIM Ipteks	DIKLAT-LITBANGDA	0	0	0	x	x	Meningkatnya aksesibilitas informasi dalam pengembangan/penerapan Ipteks
		8	Pengkajian pengembangan etos kerja masyarakat dalam pembangunan	DIKLAT-LITBANGDA	0	0	0	x	0	Tersedianya data bagi perencanaan pengembangan etos kerja masyarakat
		9	Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang Modern	BAPPEDA	0	x	0	0	0	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang modern

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwiraswasta, dan pengembangan IPTEKS	10	Pemanfaatan teknologi dalam penanganan panen dan pasca panen perkebunan	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil perkebunan
		11	Ujicoba penerapan teknologi perkebunan dengan melibatkan petani dan swasta	PERKEBUNAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi perkebunan
		12	Peningkatan sosialisasi hasil teknologi pengolahan bahan pangan	PERTANIAN	0	x	0	0	0	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi pengolahan bahan pangan
		13	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan	DINAS PDK	0	x	x	x	x	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwiraswasta, dan pengembangan IPTEKS	14	Optimalisasi pemanfaatan sarana parasarana kaji terap teknologi tepat guna	PERTANIAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pelaksanaan uji coba dan uji terap teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian
		15	Memfasilitasi peningkatan kualitas anak dan remaja	KANTOR PMD, DINAS PDK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kegiatan pembinaan anak dan remaja
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis serta kesehatan masyarakat	16	Bimbingan teknis Spesialis ke Puskesmas perawatan	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas perawatan
		17	Penambahan tenaga medis spesialis, non medis, struktural, insentif bagi tenaga pelayanan dan honor THL	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan serta kesejahteraan tenaga pelayanan
		18	Peningkatan keterampilan Medis teknis MOP	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya keterampilan tenaga medis sesuai MOP

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis serta kesehatan masyarakat	19	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan
		20	Meningkatkan jumlah obat, vaksin, dan imunisasi kit	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan imunisasi
		21	Meningkatnya kepesertaan JPKM	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan
		22	Peningkatan status puskesmas dan RS menjadi Swadana	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun RS
		23	Pengembangan sistem informasi kesehatan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Tersedianya data sebagai bahan perencanaan dan intervensi
		24	Peningkatan sarana dan prasarana medis/non medis	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Adanya kepastian jaminan kesehatan oleh Rumah sakit

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis serta kesehatan masyarakat	25	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit
		26	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Meningkatnya keteraturan lingkungan pemukiman di seluruh wilayah kabupaten
		27	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih	DINAS PUK	x	x	x	x	x	Perluasan jangkauan pelayanan air bersih di seluruh wilayah kabupaten
		28	General check up bagi pejabat Lampung Barat	RSUD LIWA	x	x	x	x	x	Adanya check up ritin bagi pejabat Lampung Barat
5	Fasilitasi program keluarga berencana (KB)	29	Peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang KB	DISPENDUK	0	0	x	0	0	Meningkatnya kemandirian masyarakat di bidang KB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Fasilitasi program keluarga berencana (KB)	30	Sosialisasi 8 (delapan) fungsi keluarga kepada masyarakat	DISPENDUK	0	x	0	0	0	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 8 (delapan) fungsi keluarga
		31	Peningkatan peran dan fungsi petugas IMP	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas pelayanan oleh petugas IMP
		32	Peningkatan pembinaan dan pelayanan KB khususnya keluarga PS KS 1	BKKBN	0	v	v	v	v	Meningkatnya kesejahteraan keluarga PS dan KS 1
		33	Peningkatan kualitas keluarga data Keluarga Berencana	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas dan kuantitas program di tingkat Lini Lapangan
		34	Peningkatan analisa dan evaluasi data	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data
		35	Peningkatan dan pengendalian monitoring serta uji petik verifikasi	BKKBN	0	v	v	v	v	Berkurangnya kesenjangan antara perencanaan dan kegiatan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Fasilitasi program ke- luarga berencana (KB)	36	Peningkatan sarana Pengelolaan dan R/R	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas dan kuantitas program di tingkat lapangan
6	Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM	37	Fasilitasi upaya-upaya peningkatan pemberdayaan perempuan	KANTOR PMD	0	x	0	x	0	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pemba- ngunan Pekon
		38	Peningkatan pembinaan dan keterampilan bagi wanita tuna susila dan wanita pemimpin kesejahteraan sosial	DISNAKER & KESMAS	x	x	x	x	x	Berkurangnya jumlah wanita tunasusila dari wanita pemimpin kese- jahteraan sosial
		39	Peningkatan KIE kesehatan reproduksi bagi remaja	BKKBN	v	v	v	v	v	Meningkatnya kesehatan produksi bagi remaja
7	Pengembangan sistem pendidikan agama formal dan non formal	40	Peningkatan kualitas madrasah dan pondok pesantren	KANDEPAG	0	v	v	v	0	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal bidang keagamaan
		41	Peningkatan sarana dan prasa- rana pendidikan agama pada se- kolah umum dan sekolah agama	KANDEPAG  DINAS PDK	0  0	v  x	v  x	v  x	v  x	Meningkatnya kualitas pendidikan formal bidang keagamaan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pengembangan sistem pendidikan agama formal dan non formal	42	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan	KANDEPAG  DINAS PDK	v  x	v  x	v  x	v  x	v  x	Meningkatnya kualitas peribadatan masyarakat
		43	Penambahan sarana dan prasarana peradilan agama	KANDEPAG	0	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan agama
		44	Peningkatan kualitas perpustakaan agama di sekolah madrasah dan pondok pesantren	KANDEPAG  DINAS PDK	0  0	0  0	0  0	v  x	v  x	Meningkatnya kualitas pembelanjaan di lingkungan sekolah madrasah dan pondok pesantren
		45	Penambahan dan pemerataan tenaga guru agama pada sekolah umum	KANDEPAG  DINAS PDK	0  0	v  x	v  x	v  x	v  x	Terpenuhinya rasio kecukupan antara guru agama dan murid
		46	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan agama pada sekolah agama dan umum	KANDEPAG  DINAS PDK	0  0	v  x	v  x	v  x	v  x	Meningkatnya pelayanan kependidikan agama pada sekolah agama dan umum

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pengembangan sistem pendidikan agama formal dan non formal	47	Peningkatan kualitas pelayanan haji	KANDEPAG	v	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas pelayanan haji
		48	Penambahan dan pembinaan tenaga penyuluh agama dan mubaligh	KANDEPAG	0	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan agama oleh penyuluh agama dan mubaligh
		49	Sosialisasi kerukunan antar umat beragama	KANDEPAG DINAS PDK	0 0	v x	v x	v x	v x	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
8	Penyuluhan dan penegakan hukum-hukum agama bagi masyarakat	50	Sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama, UU tentang Zakat dan fungsi BAZ	KANDEPAG DINAS PDK	v v	v x	v x	v x	v x	Meningkatnya kerukunan antarumat beragama, kesadaran mengeluarkan zakat, serta tupoksi BAZ
		51	Mendorong pelaksanaan penegakan hukum agama	KANDEPAG	0	v	v	v	v	Meningkatnya penerapan penegakan hukum agama
		52	Peningkatan kualitas tenaga pembantu pencatat nikah (PPN)	KANDEPAG	0	v	v	v	v	Meningkatnya kualitas pelayanan PPN

**MISI 5: MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	qwet	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inventarisasi potensi sumber daya hutan, pesisir, dan kelautan serta bahan tambang	1	Penataan batas kawasan hutan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Adanya kepastian batas kawasan hutan
		2	Inventarisasi potensi hutan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Tersedianya data potensi kawasan hutan
		3	Pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	x	x	x	x	x	Tersedianya data sumberdaya sarana dan prasarana kelautan
		4	Pelatihan dan keterampilan bagi pengusaha galian Gol. C	BAG. PER-EKONOMIAN	0	0	x	x	x	Tertibnya usaha galian Gol. C
2	Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat	5	Rehabilitasi lahan dengan jenis MPTS berbasis masyarakat	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Berkurangnya luas lahan kritis

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat	6	Pembinaan dan peningkatan kegiatan HKm berwawasan lingkungan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas kegiatan HKm
		7	Pengembangan aneka usaha kehutanan berpola HTI dan berbasis masyarakat	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya hasil pendapatan masyarakat di sekitar hutan
		8	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan
		9	Konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan	PERIKANAN DAN KELAUTAN	0	x	x	x	x	Kemantapan produktivitas hasil perikanan dan kelautan
		10	Penyusunan rencana pengembangan kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan masyarakat	PARIWISATA	0	x	0	0	0	Tersusunnya pola pengembangan kepariwisataan berbasis SDA dan masyarakat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat	11	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan	PERTANIAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya areal intensifikasi tanaman pangan (padi dan palawija) dan hortikultura
3	Inventarisasi permasalahan lingkungan hidup	12	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pemantauan lingkungan	BAPEDALDA	0	x	x	0	0	Meningkatnya kinerja aparat dalam pembinaan dan pemantauan lingkungan
		13	Pengkajian penelitian dan pengembangan pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan dan penanggulangan bencana alam	DIKLAT LITBANGDA	0	x	x	x	x	Tersedianya data bagi perencanaan pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan dan pola penanggulangan bencana alam
		14	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi	KESBANG- LINMAS	0	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana alam dan penanggulangan pengungsi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Inventarisasi permasalahan lingkungan hidup	15	Inventarisasi peladang dan perambahan hutan di dalam kawasan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Tersedianya data bagi perencanaan penanganan peladang dan perambahan hutan di dalam kawasan
		16	Inventarisasi lahan kritis di dalam kawasan hutan	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Tersedianya data bagi perencanaan penanganan lahan kritis dalam kawasan hutan
4	Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	17	Pengkajian tingkat kerusakan DAS dan APL	BAPEDALDA	0	x	x	x	x	Tersedianya data kondisi DAS dan APL sebagai dasar perencanaan pengelolaan lingkungan
		18	Pengkajian tingkat pencemaran pestisida pada lahan pertanian	BAPEDALDA	0	x	x	x	x	Tersedianya data pencemaran pestisida sebagai dasar perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	19	Pengkajian dampak pembangunan terhadap abrasi pantai dan kerusakan terumbu karang	BAPEDALDA	0	0	x	x	x	Tersedianya data tingkat abrasi pantai dan kerusakan terumbu karang sebagai dasar perencanaan pembangunan
		20	Pengkajian dampak pemukiman pada kawasan lindung	BAPEDALDA	0	0	x	x	x	Tersedianya data tingkat kerusakan kawasan lindung sebagai dasar perencanaan pembangunan kehutanan
		21	Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan data dasar lingkungan hidup	BAPEDALDA	x	x	x	x	x	Tersusunnya data dasar kualitas lingkungan hidup (NKLD)
		22	Pengkajian terhadap peran lembaga adat dan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan	BAPEDALDA	0	x	0	0	0	Terhimpunnya data kelembagaan masyarakat dan kelembagaan adat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	23	Peningkatan jangkauan WASDAL	BAPEDALDA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan WASDAL
		24	Studi Teknik Lingkungan Pengelolaan DAS Prioritas	BAPPEDA	0	0	x	0	0	Tersedianya data teknis perencanaan pengelolaan DAS Prioritas
		25	Studi Teknik Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Zone Ekonomi Eksklusif	BAPPEDA	0	0	x	0	0	Tersedianya data teknis perencanaan pengelolaan pesisir ZEE
		26	Sosialisasi daerah rawan bencana dan upaya antisipasinya	DISNAKER & KESMAS	x	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap daerah rawan dan upaya antisipasi bencana alam
		27	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan dan hasil hutan	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Menurunnya tingkat pencurian kayu dan hasil hutan lainnya

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	28	Memberikan bantuan bibit tanaman hutan kepada masyarakat	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hutan
		29	Pengembangan konsep PHT dan pengawasan terhadap keluar / masuknya media pembawa OPT	PERTANAIAN	x	x	x	x	x	Meningkatnya penerapan konsep PHT dan ter kendalinya OPT secara optimal
		30	Pengembangan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan non produktif	PERTANAIAN	0	x	x	x	x	Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pengembangan pertanian
		31	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air di lahan usaha tani	PERTANAIAN	0	x	x	x	x	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air di lahan pertanian
		32	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan	KESEHATAN	x	x	x	x	x	Mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya upaya pengendalian kualitas lingkungan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	33	Pemantauan dan pemeriksaan kelompok resiko tinggi penyakit menular seksual (PMS) dan narkoba	KESEHATAN	0	x	x	x	x	Terkendalinya penyebaran penyakit menular seksual (PMS) dan kecanduan NAZA
5	Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup	34	Peningkatan peran sertamasyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan	KEHUTANAN	x	x	x	x	x	Berkurangnya kegiatan pengrusakan hutan dan pencurian hasil hutan
		35	Sosialisasi / penyuluhan tentang fungsi hidroorologis hutan, sumber plasma nutfah, dan perlindungan flora dan fauna	KEHUTANAN	0	x	x	x	x	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan bagi kehidupan

**MISI 6: MENINGKTKAN KEBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENGUNAN**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	qwet	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembinaan dan pengembangan lembaga adat	1	Penggalian nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam hukum adat	BAPEDALDA, DINAS PDK	0	x	x	x	x	Meningkatnya penerapan hukum adat dalam upaya pelestarian lingkungan
		2	Fasilitasi program peningkatan fungsi lembaga adat dalam pembangunan	KANTOR PMD	0	x	x	x	x	Meningkatnya keberadaan lembaga adat dalam pembangunan
		3	Peningkatan keberadaan Lembaga Adat dan LSM dalam perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	0	x	x	x	x	Meningkatnya peran serta LSM dan lembaga adat dalam perencanaan pembangunan
		4	Pemberayaan lembaga adat dalam kegiatan koperasi dan PKM	DISKOP & PM	x	x	x	x	x	Meningkatnya peran lembaga adat dalam kegiatan koperasi dan PKM

**MISI 7: MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN YANG BERBASIS SUMBERDAYA ALAM DAN BUDAYA**

No.	PROGRAM STRATEGIK KABUPATEN	No. Urut	PROGRAM/KEGIATAN	DINAS/INSTANSI PELAKSANAAN TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					INDIKATOR KINERJA
					2001	2002	qwet	2004	2005	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata	1	Pembangunan sarana dan fasilitas penunjang kepariwisataan	PARIWISATA	x	x	x	x	x	Meningkatnya kegiatan kepariwisataan
		2	Pengembangan potensi kepariwisataan berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat	PARIWISATA	0	x	x	x	x	Meningkatnya kegiatan kepariwisataan berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
2	Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah	3	Pembinaan seni dan budaya daerah	PARIWISATA, DINAS PDK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk seni dan budaya daerah
		4	Pengiriman duta seni dan budaya pada event seni dan budaya dalam dan luar negeri	PARIWISATA, DINAS PDK	x	x	x	x	x	Tersebarluasnya potensi seni dan budaya Lampung Barat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peningkatan promosi kepariwisataan	5	Gelar seni dan budaya daerah dan promosi kepariwisataan	PARIWISATA, DINAS PDK	x	x	x	x	x	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Lampung Barat
		6	Peningkatan sarana dan prasarana promosi	PARIWISATA, DINAS PDK	0	x	x	x	x	Meningkatnya jangkauan promosi kepariwisataan
		7	Pembuatan / Pengadaan Sarana & Prasarana Pagelaran Seni dan Budaya	PARIWISATA, DINAS PDK	x	x	x	x	0	Tersedianya sarana dan prasarana pagelaran seni budaya
		8	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	PARIWISATA, DINAS PDK	0	x	x	0	0	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
		9	Peningkatan Kalitas & Kuantitas Aparatur bidang Kepariwisataaan	PARIWISATA, DINAS PDK	0	x	x	x	x	Meratanya pembangunan seni dan budaya pada setiap Kecamatan